

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Atmasasmita, Romli. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Chazawi, Adam. (2005). *Hukum Acara Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (1993). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Harianti, Evi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Echols, John; Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

O.C. Kaligis. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Alumni.

_____. (2006). *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Poernomo, Bambang. (1993). *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Prinst, Darwan. (1989). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.

_____. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo. (1982). *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia.

R. Wiyono. (2006). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI-Press.

_____; Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 tahun 1981. LN No. 76 tahun 1981.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. UU. No. 30 tahun 2002. LN No. 137 tahun 2002.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 tahun 1999. LN No. 40 tahun 1999. TLN No. 3874.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 tahun 2004. LN No. 67 tahun 2004. TLN No. 4401.

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor*. Keppres No. 11 tahun 2005.

3. Internet

“Polisi Pertanyakan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan”. <<http://www.antara.co.id/arc/2008/1/17/polri-pertanyakan-kewenangan-penyidikan-kejaksaan/>>. 13 Mei 2008.

Iptu. I Gede Nyoman Bratasena. “Apa Beda Penyelidikan dan Penyidikan?”, <<http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/2007/11/apa-beda-penyidikan-dan-penyelidikan.html>>. 2 Oktober 2008.

Hernowo. “Korupsi Adalah: Dari Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia”. <http://korup.wordpress.com/korupsi-adalah/>. 2 Oktober 2008.

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080819055434AARKXzG>. diakses pada tanggal 3 Desember 2008.

Taufiqurahman Ruki, “Ketua KPK Menjawab 8 Pertanyaan”. <http://www.beritaindonesia.com>. 12 November 2008.

Theodora Yuni S.P. “Sinergi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam Pemberantasan Korupsi”. <http://www.pemantauperadilan.com/opini/22.SI-NERGI%20KPK,KEPOLISIAN%20DAN%20KEJAKSAAN%20DALAM%20PEMBERANTASAN%20.pdf>. diakses pada tanggal 7 Desember 2008.

Taufiqurahman Ruki. “Wewenang KPK dan Pemberantasan Korupsi” <http://www2.kompas.com/-kompas-cetak/0503/10/opini/1594209.htm>. 7 Desember 2008.

